

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti pada penelitian Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Identifikasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang

a) *Stakeholders* Kunci

- Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang : bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengelolaan dan pemasaran desa wisata, serta memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan dan penetapan arah perkembangan desa wisata.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang : bertugas dalam menetapkan rencana strategis untuk pembangunan wilayah, merancang langkah-langkah konkret untuk pengembangan desa wisata, serta memastikan keserasalan antara pengembangan desa wisata dan rencana pembangunan secara keseluruhan.

b) *Stakeholders* Primer

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo : Penyusun program-program unggulan seperti peningkatan area wisata, peningkatan fasilitas dan peningkatan kualitas desa wisata.
- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi : Pengelola fasilitas dan pengorganisasian kegiatan wisata serta pemasaran desa wisata.

c) *Stakeholders* Sekunder

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : berperan memberikan kontribusi melalui bantuan dana untuk pengembangan desa wisata.
- Pemerintah Desa Gogik : berperan sebagai pendukung lokal yang proaktif dalam mengedukasi masyarakat, menggalang sumber daya, dan berfungsi sebagai penjemputan komunikasi dengan pihak – pihak terkait.
- Masyarakat Desa Gogik : peran masyarakat Desa Gogik beragam mulai dari pekerja, pedagang serta mereka memberikan kontribusi yang signifikan.

2. Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang

- *Policy Creator* : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang, dan Pemerintah Desa Gogik berperan sebagai pembuat kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan dan pengembangan desa wisata.

- Koordinator : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi memiliki peran sebagai koordinator dalam proses pengembangan desa wisata.
- Fasilitator : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Gogik memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pengembangan desa wisata, namun terdapat permasalahan kurangnya anggaran untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur desa wisata.
- Implementer : Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Semarang, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi memiliki peran sebagai implementer dalam proses pengembangan desa wisata, namun terdapat permasalahan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada BUMDes yang kompeten dan kurang aktifnya anggota Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata.
- Akselerator : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lohjinawi dan Masyarakat Desa Gogik memiliki peran sebagai akselerator dalam proses pengembangan desa wisata, namun terdapat permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Gogik akibat perbedaan perspektif di kalangan warga.

Faktor penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang adalah faktor nilai, faktor komunikasi, dan faktor kepercayaan.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian peran *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Gogik di Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

1. Perlunya penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan khusus untuk anggota Pokdarwis agar mereka dapat lebih memahami manfaat serta peran mereka dalam mengembangkan Desa Wisata Gogik. Kerjasama dengan institusi pendidikan atau pakar pariwisata setempat dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota Pokdarwis. Selain itu, perlu juga memberikan dukungan dan penghargaan yang dapat mendorong partisipasi aktif mereka.
2. Perlunya menjalin kemitraan dengan sektor swasta, LSM, organisasi nirlaba, dan masyarakat lokal untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah desa harus aktif membangun jaringan dengan perwakilan dari sektor swasta, LSM, organisasi nirlaba, dan masyarakat lokal melalui pertemuan dan forum diskusi. Selanjutnya, desa dapat menawarkan pertukaran sumber daya dengan mitra potensial dan membangun kepercayaan serta komitmen yang kuat melalui komunikasi terbuka dan transparan.
3. Diperlukan adanya program edukasi yang menyeluruh seperti *workshop* atau seminar tentang manfaat pariwisata bagi pembangunan desa, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta peran masyarakat dalam

pengembangan desa wisata. Program ini dapat melibatkan berbagai kelompok usia dan diselenggarakan secara berkala. Serta memastikan bahwa Pokdarwis berfungsi dengan baik dan efektif dalam menggerakkan pengembangan desa wisata.

4. Perlunya penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan keterampilan secara teratur bagi anggota BUMDes, dengan fokus pada aspek administrasi, manajemen, dan pelayanan pelanggan pariwisata. Dalam proses rekrutmen, BUMDes juga harus memastikan bahwa anggota yang direkrut memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugas yang diberikan dan evaluasi rutin terhadap kinerja anggota dan proses administratif serta pemberian umpan balik yang konstruktif dapat membantu mereka dalam meningkatkan kinerja BUMDes.
5. Pokdarwis perlu menyusun jadwal atau agenda yang jelas dan fleksibel untuk kegiatan dan pertemuan agar anggota dapat mengatur waktu mereka secara efisien. Selanjutnya, membagi tanggung jawab secara adil di antara anggota dan menggalang dukungan dari masyarakat lokal untuk membantu dalam beberapa tugas dapat membantu meringankan beban anggota Pokdarwis. Selain itu, melakukan pelatihan atau workshop tentang manajemen waktu dan keterampilan organisasi anggota Pokdarwis.